



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, PEMUDA
DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Persidangan ke-	: IV (Empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. DPRD Kabupaten Rembang; 2. Sekwan Kabupaten Rembang; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang; 4. BKD Kabupaten Rembang; 5. Perkumpulan Guru TK non PNS se-Kabupaten Rembang.
Hari/Tanggal	: Selasa, 28 Maret 2023
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Agustina W.P., SS., MM/Wakil Ketua Komisi X
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag. Setkom. X DPR RI.
Acara	: Konsultasi untuk menyampaikan usulan: 1. Seleksi dan Formasi PPPK. 2. Inpasing dan Penyetaraan Guru non PNS. 3. Mempermudah proses seleksi PPG. 4. Kepala Sekolah berstatus NUKS
Hadir Komisi X DPR RI	: ... orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Wakil Ketua 2 DPRD Kab. Rembang; 2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi 4 DPRD Kab. Rembang 3. Sekwan Kab. Rembang 4. Dinas Pendidikan Kab. Rembang 5. BKD Kab. Rembang 6. Perwakilan Guru TK non PNS Kab. Rembang

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pukul 10.30 WIB oleh Agustina W.P., SS., MM/Wakil Ketua Komisi X sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari **Wakil Ketua DPRD Kab. Rembang, Ketua Komisi 4 DPRD Kab. Rembang, Dinas Pendidikan Kab. Rembang, BKD Kab. Rembang dan Perkumpulan Guru TK Non PNS Kab. Rembang** serta menampung pertanyaan dan saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. CATATAN/KESIMPULAN

A. Komisi X DPR RI menyampaikan **apresiasi kepada Wakil Ketua DPRD Kab. Rembang, Ketua Komisi 4 DPRD Kab. Rembang, Dinas Pendidikan Kab. Rembang, BKD Kab. Rembang dan Guru TK Non PNS Kab. Rembang** yang telah menyampaikan masukan dan aspirasi dengan beberapa poin utama diantaranya:

Permasalahan dan kendala yang terjadi selama ini yaitu terkait seleksi dan formasi PPPK untuk Guru TK, impasing penyetaraan Guru Non PNS, PPG dan Kepala Sekolah ber NUKS dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Seleksi dan formasi PPPK untuk Guru TK Non PNS
 - a. Meminta dan memohon untuk mengusulkan kuota bagi guru TK Non PNS.
 - b. Meminta dan memohon menambah usulan kuota untuk formasi yang ada di kabupaten Rembang sehingga para guru di luar instansi sekolah negeri atau yang bernaung pada yayasan tetap bisa mengikuti seleksi tersebut melalui formasi umum P4 dan lain-lain.
2. Impasing bagi guru Non PNS yang belum memiliki SK Impasing GBPNS.
 - a. Meminta dan memohon untuk membuka kembali regulasi terkait penyetaraan GBPNS agar para guru Impasing lama bisa menyesuaikan masa kerja melalui penilaian PAK sesuai ketentuan.
 - b. Meminta dan memohon untuk membuka regulasi terkait usulan Impasing bagi guru Non PNS yang belum memiliki SK Impasing GBPNS.
3. PPG
 - a. Meminta dan memohon untuk mempermudah proses seleksi PPG.
 - b. Menambah kuota penerimaan PPG agar seluruh guru Non PNS bisa dan menjadi layak untuk menjadi seorang pendidik yang professional.
4. NUKS

Manfaat dan fungsi NUKS/NRKS bagi Kepala TK Swasta yang sebelumnya telah dijalankan menjadi syarat wajib menjadi Kepala TK telah dihapus dan diganti menjadi wajib lolos seleksi guru penggerak yang tidak ekuivalen. Agar para kepala sekolah ber NUKS / NKRS tidak perlu mengikuti program guru penggerak.

B. Terhadap permasalahan dan masukan yang disampaikan oleh para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI meninjau kembali kebijakan seleksi dan formasi PPPK, agar tidak hanya untuk guru sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta.
2. Terkait program inpassing, Komisi X mendesak Kemendikbudristek RI untuk membuka kembali dan menyelesaikan permasalahan program tersebut.
3. Terkait Program Sertifikasi Guru, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan pemerataan program PPG pada seluruh jenjang pendidikan.

C. Bahan paparan yang disampaikan para narasumber merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDPU. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada Pemerintah (Kemendikbudristek RI dan K/L Terkait).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.

Ketua



Agustina Wilujeng P., SS., MM. *al*